



Analisis Rekrutmen Calon Walikota Pada Pilkada Kota Banjar Tahun 2013

Tina Cahya Mulyatin¹
Riza Purnama²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, Indonesia*

Corresponding Author: cahyamulyatin@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Political Recruitment
Keyword 2;
Candidate Quality
Keyword 3;
Political Dynasty

Abstract: *One of the classic functions of political parties is related to the role of the party in nominating for office at all levels of government. the recruitment process within the party is a secret garden known only to the party itself. The purpose of this study is to analyze the process of the formation of dynastic politics in the city of Banjar and to analyze the qualifications of candidates for the Golkar party in the 2013 Pilkada of Banjar City, West Java. This study uses the candidate quality theory from Jacobson and Kernell in explaining the quality of the candidates from the Golkar Party in the 2013 Pilkada in Banjar City. Meanwhile, the supporting concept in this study is the analytical model from Morgenstern and Siavelis to explain political recruitment. As well as the concept of dynastic politics according to Kurtz. This research uses a case study model with a descriptive analysis approach. The findings in this study are that the occurrence of political dynasties in Banjar City is influenced by four factors, namely: first, the strong influence of the incumbent in maintaining power and forming a political family. Second, poor political recruitment, the third is strong encouragement from elements of Banjar society. Fourth, great financial strength. The conclusion in this study explains that overall it can be said that the quality / qualification of the candidate, Ade Uu Sukaesih, has a positive value both in the dimensions of education, training and political experience. However, the candidate quality factor is not the main factor in recruitment by Golkar but is influenced by other factors, namely the strong incumbent influence.*

Kata Kunci:

Keyword 1;
Rekrutmen Politik
Keyword 2;
Kualitas Kandidat
Keyword 3;
Politik Dinasti

Abstrak: *Salah satu fungsi klasik dari partai politik adalah menyangkut peran partai dalam mencalonkan jabatan di semua tingkat pemerintahan. proses perekrutan di tubuh partai merupakan kebun rahasia yang hanya diketahui oleh partai itu sendiri. Tujuan dalam Penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses terbentuknya politik dinasti di kota Banjar serta menganalisis kualifikasi kandidat pada partai Golkar di Pilkada Kota Banjar Jawa Barat tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori kualitas kandidat dari Jacobson dan Kernell dalam menjelaskan kualitas kandidat yang maju dari Partai Golkar dalam Pilkada di Kota Banjar tahun 2013. Sedangkan konsep pendukung dalam penelitian ini adalah model analisis dari Morgenstern dan Siavelis untuk menjelaskan rekrutmen politik. Serta konsep politik dinasti menurut Kurtz. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terjadinya dinasti Politik di Kota Banjar dipengaruhi oleh empat faktor yaitu : pertama, kuatnya pengaruh petahana dalam mempertahankan kekuasaan dan membentuk keluarga politik. Kedua, Buruknya rekrutmen politik, ketiga dorongan kuat dari elemen masyarakat Banjar. Keempat, kekuatan financial yang besar. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa*

kualitas/kualifikasi kandidat, Ade Uu Sukaesih ternyata memiliki nilai positif baik pada dimensi pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik. Akan tetapi faktor kualitas kandidat bukanlah sebagai factor utama dalam perekrutan oleh Golkar tetapi dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor kuatnya pengaruh *incumbent*.

Article History: Received 17-Agustus-2021, Revised 22-September-2021, Accepted: 28-Oktober-2021

PENDAHULUAN

Pelaksanaan rekrutmen bakal calon kepala daerah disetiap tubuh partai politik memiliki mekanisme berbeda-beda (NIM, 2019), hal ini yang membuat daya tarik penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan rekrutmen bakal calon Walikota di tubuh Partai Golkar yang berada di Kota Banjar Jawa Barat, dimana sejak berdiri menjadi daerah otonom baru pada tahun 2002 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (2002, 2004) telah melaksanakan 4 periode pilkada dimana seluruhnya dimenangkan oleh calon walikota dari kader Partai Golkar.

Periode pertama dan kedua Walikota Banjar dijabat oleh Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M, yang merupakan salah satu pendiri Kota Banjar sekaligus ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar. (radar tasikmalaya, 2015) dan saat Pilkada 2013 kembali dari kader Partai Golkar mengajukan sebagai calon walikota, yakni Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si yang merupakan istri dari Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M, hasil Pilkada 2013 menyatakan bahwa Pasangan Ade Uu Sukaesih dan dr. Darmaji sebagai pemenang dengan perolehan persentase suara 67,43% (Dalam et al., 2018).

Dari perjalanan awal Pilkada Kota Banjar sampai dengan saat ini, memang seperti tidak ada yang terlalu menimbulkan tanda tanya, pelaksanaannya berjalan dengan baik dan kondusif, namun dibalik itu semua ada hal yang menarik bagi penulis selain munculnya dinasti politik (Susanti, 2017) yaitu mekanisme rekrutmen bakal calon walikota yang ada di tubuh Partai Golkar menjelang Pilkada Kota Banjar Tahun 2013, apakah sesuai dengan mekanisme partai atau ada proses lain yang mempengaruhi keputusan DPP Partai Golkar sehingga mengeluarkan rekomendasi bagi pasangan calon walikota Ade Uu Sukaesih dan Darmaji (ASIH KATAJI).

Momentum awal terjadinya dinasti walikota di Kota Banjar muncul saat menjelang Pilkada 2013, dimana proses rekrutmen atau penjaringan bakal calon walikota itu sendiri dilakukan sehingga menjadi alasan penulis untuk meneliti peristiwa perpindahan estapet kepemimpinan Walikota Banjar 2 periode sebelumnya, yakni Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M, kepada Hj. Ade Uu Sukeasih, S.IP., MM yang merupakan istri dari walikota sebelumnya.(Fitri, 2019)

Penelitian ini memiliki pembaharuan, dimana dinasti politik di lihat dari sudut pandang rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Politik untuk menjaring bakal calon walikota atau bupati menjelang Pilkada.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan informasi dari informan sebanyak 5 orang, terdiri dari kader Partai Golkar, Tim Sukses Asih Kataji, dan Mantan Kader partai Golkar yang dirasa dapat memahami mengenai proses rekrutmen bakal calon Walikota Banjar menjelang Pilkada tahun 2013.

Metode observasi lapangan, dan dokumentasi serta wawancara mendalam adalah teknik pengambilan data dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah pada rekrutmen bakal calon Walikota Banjar sehingga terciptanya politik dinasti di Kota Banjar.

TEMUAN DAN HASIL

Dinasti Politik di Kota Banjar

Kota Banjar merupakan sebuah kota di wilayah Timur Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kota Banjar awalnya bagian dari Kabupaten Ciamis. Akan tetapi Pada tahun 2002 Banjar menjadi daerah otonom baru berdasarkan UU No 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar.

Kota Banjar yang merupakan daerah otonom baru, ternyata konstelasi politik sangat dipengaruhi oleh elit pendiri Kota Banjar. Pergolakan politik di wilayah Kota Banjar hanya bertumpu pada Dr. dr. Herman Sutrisno, yang merupakan salah satu inisiator pendirian Kota Banjar, pernah menjabat ketua DPD Golkar Kota Banjar dan dua kali menjabat walikota Banjar.

Pada saat kepemimpinan Walikota Banjar Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M, habis tahun 2013, ternyata dr Herman Sutrisno mendorong Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si untuk maju mencalonkan diri menjadi walikota Banjar periode selanjutnya. Tanpa sungkan Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M, menunjuk istrinya menjadi bakal calon walikota Banjar dari Partai Golkar. Keberhasilan memenangkan Pilkada Walikota Banjar dengan perolehan persentase suara sebanyak 67,43% . Hal ini menambah maraknya politik dinasti di Indonesia

Bagaimana politik dinasti bisa terjadi di Kota Banjar, apakah memang tidak ada calon lain sehingga tongkat kepemimpinan Kota Banjar harus jatuh pada keluarga walikota lama. Untuk itu akan dikupas dalam penelitian ini.

Rekrutmen Politik di Kota Banjar

Proses rekrutmen bakal calon Walikota Banjar sehingga terbentuknya dinasti politik di Kota Banjar, diawali oleh naiknya Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M, sebagai walikota Banjar selama dua periode, kondisi ini kemudian menguntungkan bagi Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si yang merupakan istri dari *incumbent* Walikota Banjar, untuk semakin aktif di kancah politik lokal. Apalagi didorong menjabat sebagai istri walikota. Hal inilah yang semakin mendorong Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si maju dalam Pilkada Kota Banjar Tahun 2013.

Menurut penuturan Sudrajat yang merupakan mantan Anggota DPRD Kota Banjar dari Partai Golkar “Terlebih bahwa mekanisme penjangkaran bakal calon Walikota Banjar pada tahun 2013 dari internal Partai Golkar tidak dijalankan sepenuhnya, karena pada dasarnya kandidat – kandidat bakal calon walikota seperti H. Darsono, Drs. Dadang Kalyubi, H. Yoyo dan Ade Uu Sukaesih hanyalah sebagai prasyarat dalam melaksanakan rekrutmen politik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013, Dr. Herman Sutrisno yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar dan sekaligus suami dari Ade Uu Sukaesih mempunyai peranan strategis untuk memuluskan langkah istrinya dalam pencalonan Walikota Banjar 2013 – 2018. “Terpilihnya Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si tidak terlepas dari pengaruh diluar politik (Anggoro et al., 2020)

Selain dari pengaruh diluar politik yang dikemukakan oleh (Anggoro et al., 2020), adapula pengaruh anggota senior sebelumnya yang menjabat sebagai walikota yang mampu menanamkan kharisma kepemimpinan dan warisan program unggulan yang merupakan modal paling berpengaruh (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018), hal tersebut yang terjadi disaat Dr. dr. H. Herman Sutrisno, M.M menjabat sebagai Walikota Banjar selama 2 periode, dimana Kota Banjar di awal kepemimpinan masih terfokus terhadap pembangunan infrastruktur.

Dari penuturan informan diatas jelas bahwa mekanisme penjaringan bakal calon Walikota Banjar tidak dijalankan sepenuhnya. Sehingga terbentuklah dinasti politik di Kota Banjar dipengaruhi oleh empat hal. *Pertama*, kuatnya pengaruh petahana dalam mempertahankan kekuasaan dan membentuk keluarga politik. Bagaimana sepak terjang Herman Sutrisno sebagai salah seorang inisiator pendiri Kota Banjar ternyata berlanjut pada perilaku politik yang dijalankannya di Kota Banjar. Dua kali menjadi walikota Banjar, Herman Sutrisno mampu dalam mempengaruhi elit lokal (pendiri Kota Banjar), kelompok masyarakat, pimpinan partai, pimpinan pesantren dan lain sebagainya. Kepiawaiannya dalam politik mampu menggiring masyarakat Banjar untuk memberikan kepercayaan terhadap istrinya sebagai calon walikota Banjar tahun 2013-2018.

Sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suami, ternyata mempengaruhi terhadap pola pikir Ade Uu Sukaesih (Walikota Banjar, Jawa Barat 2013-2018) bersikap dalam dunia politik lokal, ini dijadikan sebagai strategi untuk memenangkan dalam perhelatan pilwaktot. (PRATAMA MAULIDDITYA, 2019)

Bagaimana tidak 10 tahun mendampingi suami menjadi walikota Banjar, ternyata membentuk karakter Ade Uu sukaesih untuk tampil dalam ajang perpolitikan lokal. Adanya dorongan sang suami akhirnya Ade Uu Sukaesih maju sebagai kandidat bakal calon walikota Banjar (2013-2018). Kondisi tersebut ternyata sangat menguntungkan dan berdampak pada terpilihnya Ade Uu Sukaesih sebagai Walikota Banjar ke 3 (2013-2018). Seperti Penelitian yang dilakukan oleh (Bó et al., 2007) mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat maupun (Querubin, 2011) mengenai politik kekerabatan di Filipina menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Kondisi ini pula yang ditangkap oleh Dr Herman dalam mengusung istrinya menjadi walikota. Hasil penelitian Dal Bo dkk menunjukkan bahwa seorang legislator dan kepala daerah yang kerabatnya telah menduduki jabatan politik cenderung mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dengan kata lain, seseorang yang berkuasa, mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dan lebih memungkinkan untuk membentuk dinasti politik.

Kuatnya pengaruh petahana Herman Sutrisno di Kota Banjar membuatnya memiliki keinginan melanggengkan kekuasaan dengan membentuk politik kekerabatan/keluarga politik. Sebagai mana penelitian yang dilakukan oleh (Nge, 2018) dan (Sutisna, 2017) dimana politik oligarki dalam penetapan calon kepala daerah muncul politik keakraban dan kekeluargaan untuk mempertahankan kekuasaan. Karena kodrat bahwa seseorang yang sudah berada dalam pangkuan kekuasaan ingin mempertahankan kekuasaannya, dan itu merupakan tujuan dari partai politik itu sendiri agar tetap bertahan di kancah politik. Tidak dapat dipungkiri dengan memegang tampuk kekuasaan, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk memperkaya diri sendiri atau organisasi, hal ini terjadi di kancah politik lokal di Kota Banjar, di mana Herman Sutrisno yang dalam 2 periode berturut – turut ingin mempertahankan kekuasaannya di eksekutif, tetapi karena aturan maka beliau memikirkan bagaimana tampuk kekuasaan ini tetap dipertahankan.

Jika kepentingan partai politik didahulukan dan tidak ada niat meneruskan kekuasaan yang berasal keluarga terdekat, seharusnya dalam bursa kandidat calon walikota di Partai Golkar tidak ada nama anggota keluarga yang maju dalam pencalonan pemilukada Kota Banjar tahun 2013. Tapi pada kenyataannya muncul nama Ade Uu Sukaesih yang merupakan istri dari mantan Walikota Banjar yang telah menjabat sebelumnya selama 2 periode.

Kedua, buruknya fungsi rekrutmen partai politik. Buruknya fungsi rekrutmen partai politik di Kota Banjar turut menyumbang terjadinya politik dinasti. Bagaimana ini bisa terjadi, ternyata 10 tahun berdiri Kota Banjar tidak ada proses kaderisasi elit politik (Prakoso &

Alfirdaus, 2018) yang memiliki popularitas yang tinggi (Primajaya, 2013). Partai politik yang ada di Kota Banjar tidak mampu merekrut kandidat yang layak naik menjadi walikota ataupun wakil walikota, hal ini diperkuat dengan tingginya dukungan beberapa partai politik terhadap Ade Uu Sukaesih, untuk maju dalam Pilkada Kota Banjar tahun 2013. Demikian juga pada partai Golkar Kota Banjar, agar terlihat proses rekrutmen berjalan demokratis, dimunculkan 4 nama yang maju dalam kontestasi di internal partai untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon walikota Banjar. Tetapi pada kenyataannya itu hanya fiktif, ternyata proses rekrutmen tidak ada, dan secara aklamasi mendukung Ade Uu Sukaesih. Kondisi ini untuk memeperlihatkan pada umum, seolah ada proses rekrutmen di tubuh Golkar. Inilah proses manipulasi dalam rekrutmen politik agar seleksi kandidat terlihat demokratis di tataran lokal.

Buruknya rekrutmen parpol (Hanafi, 2016) di Kota Banjar dapat dilihat dari Calon Walikota-Wawalkot Banjar pada tahun 2013, dari 5 pasang Calon Walikota - Wawalkot Banjar hanya ada 2 pasang kandidat yang berasal dari partai politik yaitu Ade Uu Sukaesih dan Drg. Darmadji yang mendapat dukungan dari Partai Golkar, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB dan PKPI. Sedangkan pasangan lainnya yaitu Akhmad Dimiyati-Muin Abdurochim yang di usung oleh PDIP dan PBB. Sedangkan 3 pasangan lainnya adalah berasal dari calon independen yaitu Maman Suryaman-Wawan Ruswandi, Herli Rusli Suryatin-Wawan Gunawan serta Ijun Judasah-Mochammad Shoddiq.

Pemilukada yang merupakan momen penting bagi partai politik untuk membuktikan apakah mampu merekrut kader – kader terbaiknya untuk maju dalam pencalonan atau tidak sama sekali. Di tambah proses rekrutmen calon kepala daerah di partai politik selalu bersifat tertutup. Praktik jual beli kursi pencalonan pun menjadi ruang gelap yang tak bisa diintervensi. Pihak penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tak bisa mengintervensi rekrutmen calon kepala daerah lantaran hal itu jadi kewenangan partai sepenuhnya. Karena yang diproses oleh KPU, yang diawasi oleh Bawaslu adalah peserta pemilu yang muncul dari proses rekrutmen yang buruk di partai politik.

Jika dilihat dari perhelatan politik dalam pemilukada Kota Banjar tahun 2013, jelas bahwa partai politik tidak mampu menampilkan calon terbaiknya. Bahkan partai sekelas Partai Golkar pun pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Ade Uu Sukaesih yang merupakan istri Walikota Banjar periode sebelumnya.

Ketiga, kuatnya dorongan dari elemen masyarakat Banjar. Kemampuan Herman Sutrisno dalam mempengaruhi masyarakat Kota Banjar ternyata mendorong sebagian elemen masyarakat untuk mendorong melanjutkan kekuasaan di lanjutkan oleh sang istri Ade Uu Sukaesih. Kondisi ini terjadi karena saat memimpin Herman Sutrisno membiayai beberapa elemen masyarakat (LSM) dalam bentuk proyek-proyek kecil. Sebut saja ada Geram (Gerakan Rakyat Anti Maksiat), LSM Pelangi dan lain sebagainya. Kelompok di atas sebagai pendukung petahana dan selalu mendapatkan jatah proyek setiap tahunnya. Keuntungan dari proyek digunakan untuk membiayai organisasi dan bagi pimpinan organisasi. Beberapa pesantren, organisasi masyarakat yang turut mendapatkan sumber daya saat petahana memimpin, ikut majunya Ade Uu Sukaesih dalam kontestasi politik di Kota Banjar.

Perilaku petahana dengan merekrut elemen masyarakat guna mendukung kepemimpinannya berakibat pada dukungan elemen tersebut pada pemilu selanjutnya. Hal ini dianggap lumrah karena ada timbal balik bagi masing-masing dan saling menguntungkan. Petahana membutuhkan dukungan kuat elemen masyarakat dalam memimpin kota dan elemen masyarakat mendapatkan timbal balik financial dalam bentuk proyek atau sumber daya yang lainnya. Seperti proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Kemampuan petahana dalam merawat elemen pendukung ternyata membawa keuntungan bagi keluarga petahana untuk naik

pada periode selanjutnya, dan ini dibuktikan dengan naiknya Ade Uu Sukaesih pada Pilkada Kota Banjar tahun 2013.

Keempat, faktor financial. Kuatnya financial yang dimiliki oleh petahana turut menyumbang pembentukan dinasti politik di Kota Banjar (Purnama & Dewi, 2020). Petahana mendorong sang istri untuk maju, dengan di *endorse* kekayaan financial yang besar. Herman Sutrisno yang merupakan petahana, memberikan dorongan financial kepada partai koalisi pengusung, sehingga rekomendasi bakal calon walikota turun dari partai pengusung kepada Ade Uu Sukaesih. Nilai mahar politik ke partai koalisi pengusung Ade Uu Sukaesih nilainya cukup fantastis.

Faktor financial memang menjadi tradisi dalam perpolitikan di Indonesia pada tataran local. Sebagaimana dalam (Berenschot & Aspinall, 2020) dan (Anggoro, 2020) menjelaskan hal tersebut sangat sulit dihilangkan jika tingkat Pendidikan politik masyarakat masih belum meningkat.

Kualifikasi Kandidat Dinasti Politik

Naiknya keluarga politik pada pucuk pimpinan di daerah (kepala daerah) menyisakan seribu pertanyaan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mendukung terhadap naiknya keluarga politik/dinasti politik. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah layak keluarga politik menjadi kepala daerah, bukankah ia naik karena dorongan kuat dari petahana.

Untuk menjelaskan bagaimana kualifikasi Ade Uu Sukaesih yang sudah terpilih sebagai Walikota Banjar Periode 2013-2018. Dalam menjelaskan kualifikasi kandidat Ade Uu Sukaesih, maka akan digunakan konsep kualitas kandidat dari Jacobson dan Kernell dalam (Anggoro, 2020) terdiri atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik.

Bagaimana kualitas kandidat Ade Uu Sukaesih maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendidikan

Salah satu faktor yang menjelaskan tentang kualifikasi kandidat calon kepala daerah bila mengacu pada (Jacobson & Kernell, 1983) adalah faktor pendidikan. Bagaimana kualifikasi pendidikan Ade Uu Sukaesih maka dapat dijelaskan bahwa Ade Uu Sukaesih merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP Bina Putera Banjar) jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2007, dan melanjutkan pada program S2 di Universitas Pasundan Bandung dengan jurusan kebijakan public tamat tahun 2011. Dengan demikian jika melihat sekolah di jenjang pendidikan tinggi ternyata Ade Uu Sukaesih cukup baik dan merupakan sekolah yang berlatar belakang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan jika merunut pada pendidikan yang diikuti Ade Uu Sukaesih maka sudah tepat bila menjadi kandidat calon kepala daerah, karena pendidikan tersebut sangat mendukung terhadap pencalonannya menjadi kepala daerah.

2) Pelatihan

Bagaimana pelatihan yang dimiliki oleh Ade Uu Sukaesih. Dapat dijelaskan bahwa Ade Uu Sukaesih telah mengikuti kegiatan pelatihan pada partai Golkar di mulai di daerah dan pada tingkat Provinsi. Ini sangat menunjang, karena Ade Uu Sukaesih sudah mendapatkan kepelatihan dari partai Golkar seperti materi Ideologi partai, politik, pemerintahan dan kepemimpinan. Dengan demikian, jika di lihat dari segi pelatihan yang pernah diikuti Ade Uu Sukaesih di partai Golkar, maka Ade Uu Sukaesih dapat dikatakan layak bila dijadikan kandidat dan direkrut oleh Golkar sebagai kandidat calon kepala daerah (Walikota).

Pelatihan yang diikuti di partai politik merupakan bentuk sosialisasi dan pembentukan karakter kader partai, sehingga setelah mengikuti kepelatihan, diharapkan setiap kader dapat

memahami hakekatnya terhadap partai. Ini merupakan bentuk pendidikan politik kepada kader partai. Pada saat pelatihan, kader akan diperkenalkan terhadap ideology partai politik. Ini penting karena ideologi merupakan pijakan dalam pergerakan partai politik (Noor, 2016) Atau dikatakan juga sebagai motor penggerak kegiatan partai dalam menjalankan roda perpolitikan.

3) Pengalaman Politik

Bagaimana pengalaman politik Ade Uu Sukaesih, dapat dijelaskan sebagai berikut;

a) Aktifitas dalam Partai Politik

Bagaimana aktifitas Ade Uu Sukaesih, ternyata dia sudah lama bergabung menjadi kader partai Golkar sejak zaman orde baru tahun 1992, artinya aktifitas di partai sudah cukup lama. Kemudian tahun 2002, sejak Kota Banjar menjadi kota otonom terlepas dari Kabupaten Ciamis , Ade Uu Sukaesih bersama dengan suami menjadi pengurus pada DPD Partai Golkar Kota Banjar. Dengan berbagai jabatan di DPD Golkar Kota Banjar. Tahun 2004-2008 menjadi ketua perempuan Golkar Kota Banjar, dan tahun 2008, menjadi wakil ketua DPD Golkar Kota Banjar. Pada tahun 2009 Ade Uu Sukaesih menjadi Caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Jawa Barat, Akan tetapi tidak terpilih. Dari sini dapat dijelaskan bahwa Ade Uu Sukaesih memiliki pengalaman yang lama dalam partai politik dan hal ini turut membentuk karakternya dalam perpolitikan lokal. Artinya dari sudut aktifitas dalam politik sangat banyak karena sejak 1992 sudah menjadi kader aktif di partai Golkar Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Jawa Barat.

b) Pengalaman dalam Organisasi

Sementara terkait dengan pengalaman dalam organisasi, Ade Uu Sukaesih lama berkiprah di Golkar sejak zaman Orde Baru. Tahun 1992 menjadi kader Golkar Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Tahun 2004-2008 menjadi ketua perempuan Golkar Kota Banjar, dan tahun 2008, menjadi wakil ketua DPD Golkar Kota Banjar. Ini merupakan pengalaman yang mendukung karir Ade Uu Sukaesih dalam bidang politik. Sedangkan pengalaman lain dalam organisasi adalah menjabat sebagai ketua TP PKK Kota Banjar ketika suami menjadi walikota Banjar. Berdasarkan pengalaman dalam organisasi baik organisasi politik dan non politik ternyata turut mendukung pembentukan karakter Ade Uu Sukaesih dalam politik. Hal ini menjadi nilai tambahan bagi Ade Uu Sukaesih saat menjadi kandidat Walikota dari Partai Golkar.

c) Pengalaman Pekerjaan

Bagaimana dengan pengalaman pekerjaan Ade Uu Sukaesih sebelum menjadi Calon Kepala daerah Kota Banjar. Ternyata Ade Uu Sukaesih pernah bekerja di Bank BNI sebelum menikah. Akan tetapi setelah menikah dia keluar dan mengikuti suami. Di sini dijelaskan pengalaman pekerjaan Ade Uu Sukaesih tidak ada.

Secara umum bagaimana kualifikasi kandidat Ade Uu Sukaesih dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. Konfigurasi Kualitas Kandidat

No	Dimensi	Nilai
1	Kualiatas kandidat	
	Pendidikan	+
	Pelatihan	+
	Pengalaman Politik	
	1). Pengalaman di Partai	+
	2). Pengalaman Organisasi	+
	3). Pengalaman Pekerjaan	-

Sumber: Data diolah Peneliti, 2020

Secara umum jika merujuk pada table 1 konfigurasi kualitas kandidat, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi pendidikan, ternyata Ade Uu Sukaesih merupakan pemilik gelar S1 Ilmu Pemerintahan dan Magister bidang kebijakan publik. Di sini nilai pendidikan adalah positif. Pada bidang pelatihan, Ade Uu Sukaesih mendapat nilai positif, di mana dia sudah mengikuti pelatihan di partai Golkar dari mulai tingkat DPD Kabupaten hingga DPD Provinsi. Sedangkan dalam bidang pengalaman politik, ternyata dari tiga kriteria : pengalaman di partai; pengalaman di organisasi dan pengalaman pekerjaan, dua nilai pengalaman di partai dan pengalaman di organisasi bernilai positif karena mendukung dalam pengalaman politik. Sedangkan dalam pengalaman pekerjaan tidak ada hal yang mendukung. Akan tetapi dari segi pengalaman politik secara umum memiliki nilai positif.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kualitas/kualifikasi kandidat, Ade Uu Sukaesih ternyata memiliki nilai positif di semua dimensi, artinya Ade Uu Sukaesih layak untuk diajukan sebagai kandidat calon Kepala daerah (walikota) Banjar.

Akan tetapi secara umum rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar pada Pilkada Kota Banjar tahun 2013 tidak menggunakan faktor kualitas kandidat, kandidat yang terpilih oleh Partai Golkar adalah Ade Uu Sukaesih yang secara umum memiliki kualifikasi/kualitas kandidat yang baik. Tetapi faktor kualitas kandidat bukanlah sebagai faktor utama dalam perekrutan. Tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu Golkar lebih mengedepankan faktor *incumbent* (di Kota & Yustian, n.d.) untuk memilih kandidat, ini terlihat karena incumbent merupakan salah satu tim selektorat di DPD Golkar Jawa Barat. Inilah faktor yang memunculkan dinasti politik (Amelia, 2015) di Kota Banjar.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, mekanisme rekrutmen bakal calon kandidat walikota Banjar yang dilakukan oleh Partai Golkar belum berjalan dengan baik, sehingga kesan terbentuknya dinasti politik di kota Banjar mencuat. Sebagian besar parpol ikut dalam koalisi mendukung Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si – Drg Sudarmaji. Majunya Ade Uu Sukaesih dari partai Golkar pun turut menyumbang belum optimalnya mekanisme penjurangan bakal calon Walikota Banjar dari internal Partai Golkar. Bagaimana tidak Golkar yang merupakan partai pemenang Pileg tahun 2004 dan 2009 justru memajukan Ade Uu Sukaesih Istri dari Walikota Banjar yang saat itu sedang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar. Sesungguhnya rekrutmen tidak dijalankan sepenuhnya, karena pada dasarnya kandidat – kandidat bakal calon walikota seperti H. Darsono, Drs. Dadang Kalyubi, H. Yoyo hanyalah sebagai prasyarat dalam melaksanakan rekrutmen politik, seolah rekrutmen dijalankan secara demokratis. Padahal Golkar sudah menyiapkan calon kuat Ade Uu Sukaesih.

Dinasti Politik di Kota Banjar dipengaruhi oleh empat faktor pendukung yaitu pertama, kuatnya pengaruh petahana dalam mempertahankan kekuasaan dan membentuk keluarga politik. Kedua, Buruknya rekrutmen politik, dan ketiga dorongan kuat dari elemen masyarakat Banjar. Keempat, kekuatan financial yang besar.

Walaupun Ade Uu Sukaesih merupakan keluarga politik dari incumbent, tetapi secara kualifikasi kandidat Ade Uu Sukaesih memiliki nilai positif. Hal ini dilihat dari dimensi pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimilikinya.

SARAN

Melihat fenomena kurang optimalnya rekrutmen calon kandidat walikota dan juga peluang untuk mempertahankan kekuasaan, maka penulis menyampaikan saran khususnya

kepada DPC Partai Golkar dan umumnya Partai Politik. Bahwa kaderisasi melalui kualifikasi kandidat politik perlu dijalankan dan senantiasa di evaluasi, agar fenomena dinasti politik tidak menjadi citra buruk bagi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. P. (2015). *Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Anggoro, T. (2020). *Rekrutmen Politik Dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah (Studi Perbandingan Pada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya Jawa Barat Tahun 2017)*.
- Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95-106.
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: Comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1-19.
- Bó, E. D., Cattaneo, M., Tella, R. Di, Foster, A., Galor, O., Hallak, J. C., Knight, B., Levine, D., Mas, A., Moretti, E., Olken, B., Roland, G., & Shepsle, K. (2007). Dal Bó, Dal Bó y Snyder. Political Dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115-142.
- Dalam, P. A., Wali, P., & Banjar, K. (2018). *Strategi pemenangan pasangan ade uu sukaesih-darmadji prawirasetia (asih-katadji) dalam pemilu wali kota banjar periode 2013-2018 wiwi widiastuti*. 5(1).
- A. H.-D. Y., & Yustian, Y. (2013). *STRATEGI KAMPANYE POLITIK CALON INCUMBENT DAN PENDATANG BARU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH*.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91-111.
- Hanafi, R. I. (2016). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 16.
- Jacobson, G. C., & Kernell, S. (1983). *Strategy and choice in congressional elections*.
- Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 59-84.
- NIM, J. (2019). REKRUTMEN PARTAI GOLKAR DALAM PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2018. *ASPIRASI-Jurnal Ilmu Politik*, 7(4).
- Noor, F. (2016). Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.
- Prakoso, D. W. U., & Alfirdaus, L. K. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 181-190.
- PRATAMA MAULIDDITYA, R. (2019). *STRATEGI MARKETING POLITIK PASANGAN ADE UU SUKAESIH DAN NANA SURYANA PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018*. Universitas Siliwangi.
- Primajaya, R. (2013). *Kecenderungan Popularitas Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Menurut Surat Kabar Radar Bekasi dan Bekasi Ekspres News Periode November 2012 (Studi Analisis Isi Radar Bekasi dan Bekasi Ekspres News)*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Purnama, R., & Dewi, M. T. F. (2020). PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR TAHUN 2018. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 245-256.
- Querubin, P. (2011). *Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines*.
- radar tasikmalaya. (2015). *Daftar Wali Kota Banjar*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wali_Kota_Banjar

- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2), 301–322.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119.
- Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100–120.